

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DI DESA BATU GADING KECAMATAN
MARE KABUPATEN BONE**

Dewi Krisna Purnama

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Aslinda110@Yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang diukur dengan indikator Efisiensi, Efektivitas, Keadilan dan Daya tanggap. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa sudah berjalan dengan baik, namun pada fungsi menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya baik terkait pada indikator Efektivitas dikarenakan keadaan sumber daya manusia yang ada pada BPD yang kurang aktif, BPD tidak melakukan komunikasi yang baik dilingkungan masyarakat secara langsung dalam menampung aspirasi masyarakat, serta tidak adanya sarana seperti kantor BPD untuk mendukung terlaksananya fungsi BPD dengan baik.

Kata Kunci: Kinerja , Pelaksanaan fungsi.

1. Latar Belakang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2014, hal. 165). Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta keputusan Kepala desa.

Dengan adanya perwujudan demokrasi di desa, Kepala desa tidak lagi sebagai pusat kebijakan seperti masa lalu. (Romli, 2017, hal. 37) menyatakan bahwa selama ini dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa lebih berfokus hanya pada lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Seharusnya yang menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya kepala desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa pasal 55 adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

BPD memiliki tugas bersama Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Tugas BPD disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat, BPD juga diharapkan melalui fungsinya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, BPD harus berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya. Kepentingan dan aspirasi masyarakat pada era reformasi ini menjadi landasan dan tujuan reformasi. Landasan tersebut menjadikan tolak ukur, kriteria, dan batu uji dari reformasi itu sendiri.

Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang sudah wajar, bila ada perbedaan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, maka kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. (Adisasmita, 2018, hal.

21) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara teoritis sudah terakomodasi dalam prosedur perencanaan pembangunan. Jika masyarakat belum berpartisipasi secara optimal maka hal tersebut dapat terjadi karena proses penggalangan partisipasi masyarakat belum dipahami dengan benar oleh semua pihak yang terkait. Maka dari itu BPD harus berkinerja dengan baik agar dapat menjalankan semua fungsinya dengan baik.

Penampungan aspirasi masyarakat di Desa Batu Gading yang dilakukan oleh BPD tidak berjalan dengan baik dapat dilihat dari tidak adanya usaha dari BPD untuk menggali aspirasi masyarakat, kurangnya komunikasi anggota BPD kepada masyarakat dan masih ada beberapa aspirasi masyarakat yang berupa usulan-usulan pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan hasil observasi dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di desa tersebut terkait beberapa keluhan masyarakat desa yang sudah lama dirasakan dan mencocokkan apa yang dikatakan masyarakat tersebut dengan keadaan lingkungan desa yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, informasi yang didapatkan dari masyarakat yang mengatakan bahwa BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat belum melakukan tugasnya dengan baik, BPD kurang berupayah untuk menggali aspirasi masyarakat, BPD kurang berkomunikasi kepada masyarakat terkait keluhan maupun usulan yang mereka rasakan mungkin anggota BPD mempunyai kesibukan masing-masing jadi jarang terlihat.

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu oleh Nurhakiki (2016) dengan judul penelitian “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat” menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian tersebut adalah kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat meliputi cara BPD menyerap ide ataupun gagasan masyarakat desa. Cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut: menyelenggarakan musyawarah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan social network, penyediaan rumah aspirasi, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, mengadakan loka karya. Kelima metode tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh Lembaga BPD kota Jawa. Dapat diambil kesimpulan, kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat belum efektif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Assegaf (2017) “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep” menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah fungsi BPD dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, namun fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Perbedaan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada di lokasi dimana akan dilakukan penelitian tersebut, dan teori yang digunakan dalam mengukur kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa beberapa masyarakat mengatakan bahwa kurangnya komunikasi BPD terhadap warga dalam menampung aspirasi. Komunikasi memudahkan pelaksana dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan, Guntur, M. Yamin, M, N (2017, Hal 85). Masyarakat merasa aspirasi mereka terkait usulan pembangunan di Desa Batu Gading masih sangat sedikit yang terealisasi, dan meminta BPD untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Desa Batu Gading, seperti, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa yang merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk mendukung program desa, Niswaty dkk (2020, Hal 783), sebab beberapa masyarakat mengatakan masih belum banyak melihat perubahan-perubahan yang baik terkait pembangunan di desa tersebut. Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten

Bone”.

2. Rumusan Masalah

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta

menjalankan fungsi pengawasan, namun permasalahan saat ini BPD kurang melaksanakan fungsinya dengan baik, Permasalahan tersebut yang telah di jelaskan juga pada latar belakang, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone?

3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone

4. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Kinerja

Menurut (Kasmir, 2017, hal. 182) kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja seseorang dalam suatu periode, biasanya satu tahun. Kemudian kinerja dapat diukur dari kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Artinya dalam kinerja mengandung unsur standar pencapaian harus dipenuhi, sehingga bagi yang mencapai standar yang telah ditetapkan berarti seseorang telah berkinerja dengan baik atau sebaliknya bagi yang tidak tercapai dikategorikan berkinerja kurang atau tidak baik.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Wibowo, 2010, hal. 48) kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian

tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Dalam praktiknya kinerja dibagi kedalam dua jenis yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi.

Menurut Ivancevich (Kasmir, 2017, hal. 183) menyebutkan kinerja adalah hasil yang dicapai dari apa yang diinginkan oleh organisasi. Kinerja (job performance) juga merupakan fungsi dari:

- a) Kapasitas untuk melakukan, yang berkaitan dengan derajat hubungan proses dalam individu yang relevan antara tugas dengan keahlian, kemampuan. Pengetahuan dan pengalaman.
- b) Kesempatan melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dan teknologi.
- c) kerelaan untuk melakukan berhubungan dengan dengan hasrat kerelaan untuk menggunakan usaha mencapai kinerja.

b. Indikator Kinerja

Menurut (Sedarmayanti, 2011, hal. 224) indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya di tetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja menganjurkan sudut pandang prospektif (melihat ke belakang). Hal ini menunjukkan aspek kinerja yang perlu diobservasi.

Terdapat tujuh indikator kinerja menurut (Wibowo, 2010, hal. 102–105)

dua diantaranya mempunyai peran sangat penting yaitu tujuan dan motif. Kinerja

ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan

adanya motif. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari

kinerja. Namun, kinerja memerlukan dukungan sarana, kompetensi, peluang,

standar, dan umpan balik. Kaitan diantara ketujuh indikator tersebut digambarkan

oleh Hersey Blanchard, dan Johnson.

c. Definisi Badan Permasyarakatan Desa

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan sebagai mitra pemerintah desa. Peran BPD sangat penting baik dalam pembuatan peraturan, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan pemerintahan desa terutama dalam hal pembangunan dapat yang harus tepat sasaran berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa kehadiran BPD di desa adalah sebagai wujud demokrasi, BPD dimaksudkan untuk lebih melibatkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan kelompok tertentu, sehingga masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi di desa terkhusus dalam hal pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

**d. Fungsi Badan
Permasyarakatan Desa
Fungsi Badan**

Permasyarakatan Desa menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi.

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permasyarakatan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala desa dan Perangkat desa), melalui beberapa proses sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.

- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu atau dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hal ini menggambarkan bagaimana menyusun perencanaan tentang pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan di desa yang harus melibatkan aspirasi masyarakat. Salah satu contohnya BPD dapat turun langsung kelapangan untuk menampung aspirasi masyarakat atau dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah desa agar BPD dapat meminta masukan dari masyarakat secara langsung.

- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, Evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa setiap satu tahun anggaran.

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala desa dan Perangkat desa).

Dilihat pembangunan di Desa Batu Gading yang belum baik diantara Desa yang ada di Kecamatan Mare membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai mitra dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga sebagai agen pembangunan di Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Tangkilisan (2005) untuk mengukur kinerja, yang mempunyai 4 variabel yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap.

5. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar. Metode deskriptif dipilih karena peneliti akan mengungkapkan data berdasarkan pengamatan, dan menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta yang ada di lapangan.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten

Bone yang mana fungsi BPD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 adalah Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD sebagai salah satu agen pembangunan di desa dan sebagai wakil masyarakat harus berkinerja dengan baik melaksanakan semua fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat menjadi cermin masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijaksanaan dan melakukan pembangunan bersama pemerintah desa yang harus berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak (rakyat).

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading dengan menggunakan teori dari Tangkilisan, kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dapat dijabarkan, sebagai berikut:

a. Efisiensi

BPD dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah menampung aspirasi masyarakat pada saat melakukan pertemuan tingkat desa, namun BPD kurang melakukan komunikasi langsung atau jarang turun langsung kelapangan untuk menggali atau menampung aspirasi masyarakat, sedangkan di setiap dusun ada perwakilan dari anggota BPD yang sudah ditentukan untuk mewakili masyarakat di dusun tersebut, kepala

dusun yang lebih berperan dalam menampung aspirasi masyarakat dilingkungan masyarakat langsung.

b. Efektivitas

Terkait dengan Sumber daya dan sarana pada BPD belum sepenuhnya mendukung terlaksananya fungsi BPD, ada anggota BPD yang sudah tidak aktif, dan anggota lainnya yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai PNS sehingga dalam melaksanakan fungsinya untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung di lingkungan desa, masih belum bisa maksimal, namun terkait sumber daya biaya operasional dan tunjangan BPD sudah baik.

c. Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian Kinerja BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa serta menampung aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan, BPD bersama pemerintah desa sudah bersikap adil yaitu semuanya sudah berdasarkan aspirasi semua masyarakat di tiga dusun yang ada di Batu Gading seperti perbaikan jalan yang dilakukan setiap tahun dimasing-masing dusun sudah dilaksanakan.

d. Daya tanggap

Berdasarkan hasil penelitian BPD sudah menanggapi dan berusaha untuk menyediakan tuntutan ataupun kebutuhan dari masyarakat, BPD menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa agar tuntutan masyarakat maupun kebutuhan mereka dapat dimasukkan keprogram pembangunan di Desa Batu Gading sehingga anggaran desa bisa diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan maupun tuntutan masyarakat, dapat dilihat pada data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang anggarannya sudah banyak diarahkan kepada perbaikan jalan dan kebutuhan masyarakat lain.

7. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading Kecamatan MareKabupaten Bone, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efisien

Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sudah efisien terkait membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa seperti pembuatan Perda RKPBDdes, BPD sudah menampung aspirasi masyarakat pada saat melakukan pertemuan ditingkat desaserta fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa BPD sudah melakukannya sesuai UU No. 6 Tahun 2014.

2. Efektivitas

Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya belum sepenuhnya efektif dilihat dari keadaan sumber daya manusia dan sarana yang belum mendukung terlaksananya fungsi BPD dengan baik terutama dalam hal menggali dan menampung aspirasi masyarakat.

3. Keadilan

Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sudah adil, dikarenakan dalam membahas dan menetapkan peraturan desa serta menampung aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan, BPD bersama

pemerintah desa sudah bersikap adil yaitu semuanya sudah berdasarkan aspirasi semua masyarakat di tiga dusun yang ada di Batu Gading.

4. Daya tanggap

Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sudah memiliki daya tanggap yang baik, dilihat dari BPD sudah menanggapi dan berusaha untuk menyediakan tuntutan ataupun kebutuhan dari masyarakat, BPD menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa agar tuntutan masyarakat maupun kebutuhan mereka dapat dimasukkan keprogram pembangunan di Desa Batu Gading sehingga anggaran desa bisa diarahkan untuk memenuhi tuntutan ataupun kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Efisien

Diharapkan kepada BPD agar lebih baik lagi dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, BPD diharapkan melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya karena telah ada ditetapkan perwakilan anggota BPD di setiap dusun.

2. Efektivitas

Diharapkan kepada anggota BPD lebih aktif melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat serta mengadakan sarana seperti kantor BPD agar lebih mendukung terlaksananya tugas dan fungsi BPD lebih baik.

8. Daftar Pustaka

Sumber Buku

Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Pedesaan*. Expert.

Kasmir. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers.

Prabu, A. (2007). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama.

Riani, A. L. (2011). *Budaya Organisasi*. Graha Ilmu.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.

Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers.

9.

Widjaja, H. (2014). *Otonomi Desa*. Rajawali Pers.

Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Niswaty, R. Nur, A.C. Hasni. Sesa, D.R (2020) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kepala Pitu Kabupaten Toraja Utara*. Kemajuan Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, (473)

Guntur, M. Yamin, M.N (2017) *Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Dana Desa di Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan*. Kemajuan dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan Penelitian Humaniora (149)

Nurhakiki, A. (2016). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat*. Lampung.

Romli, O. (2017). *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam*

Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa.
Ilmu Pemerintahan, 3(1).

Sumber Undang-undang

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor
2 Tahun 2015 Tentang Badan
Permusyawaratan desa.